

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik (*good governance government*). *Good governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Fenomena yang terjadi di Indonesia dalam era reformasi sektor publik saat ini adalah menguatnya tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas publik dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah mendorong Pemerintah Daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan

suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, di mana laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah merevisi PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP no. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan akuntansi berbasis kas menjadi akrual bukan sekedar masalah teknis pencatatan transaksi dan menyajikan laporan keuangan, tetapi membutuhkan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), serta mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Oleh karena itu, proses pelaporan keuangan pemerintah harus dikerjakan oleh SDM yang memiliki kompetensi agar mampu menyusun dan menyajikan LKPD yang berkualitas.

Pertanggungjawaban keuangan pemerintah agar menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan. Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002: 146).

Selain sumber daya manusia hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah teknologi informasi. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat potensi

pemanfaatannya secara luas, dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang direvisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010.

Jika faktor-faktor tersebut diterapkan dalam penyusunan pelaporan keuangan maka laporan yang dihasilkan pemerintah dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Namun pada kenyataannya, laporan keuangan merupakan unsur nilai informasi yang sering terjadi masalah. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA Tahun 2015, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Boyolali dinilai memenuhi kriteria dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Meski memperoleh opini WTP, masih terdapat permasalahan terkait kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan. Permasalahan-permasalahan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan antara lain: Pemerintah Daerah belum memenuhi kewajiban program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdapat indikasi penyimpangan dalam proses pelelangan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) serta pengendalian dan penagihan piutang pajak atas tunggakan pajak belum memadai.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah yang baik dan benar. Pemerintah daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas, namun saat ini banyak fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai yang menimbulkan tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi diharapkan pihak pengelola keuangan daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada terciptanya *good governance*.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Adakah pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Adakah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan serta memberikan pengalaman dan wawasan dalam pengembangan kemampuan ilmiah khususnya pada penelitian tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia,

pemanfaatan teknologi dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan literatur akuntansi yang sudah ada serta menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai pertimbangan dalam upaya peningkatan pengetahuan pejabat keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu dalam memantau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tanggungjawabnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dibahas tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran teoritis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, juga model analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dibahas deskripsi objek penelitian dan pembahasan.

### **BAB V PENUTUP**

Penutup terdiri atas simpulan, saran dan keterbatasan penulisan mengenai penelitian yang telah dilakukan.